

KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN DI KABUPATEN BANYUMAS JAWA TENGAH

Pramono Hariadi

Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

Arintoko

Jurusan IESP Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

Icuk Rangga Bawono

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jenderal Soedirman

E-mail: cukycute@yahoo.com

Abstract

The central theme of this paper is the measurement of income inequality by investigating its present time in Banyumas. It is important to know the impact of local development process on income inequality. Not only the impacts of local development, but also other factors determining the trend of income inequality (i.e. fuel price raises, price and income adjustment policies) give impact on present income inequality. Nowadays, the local development policies and the other factors are predicted that they give impact on the raise of recent income inequality in Banyumas.

Based on Gini coefficient measurement method, we obtain startling result. The result presented in this paper is based on a sample of 180 households including urban area, sub urban area and rural area. The Gini coefficient result is 0,603. This result shows the sharp raise of income inequality from past time to recent in Banyumas.

The imbalance of development between modern sectors (i.e services, construction, finance, trade and manufacture) and traditional sectors (i.e agriculture and informal sector) causes the raise of income inequality. Based on this trend of the raise of income inequality, local government must practice pro poor development policies without ignoring sustainable economic growth and especially focusing on agriculture, rural economy, informal sector, small and medium industries.

Keywords: *income inequality, Gini coefficient, pro-poor policy, sustainable growth*

PENDAHULUAN

Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang

berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*) (Tambunan, 2001). Keyakinan mengenai adanya efek menetes ke bawah (*trickle down effects*) dalam proses pembangunan telah menjadi pijakan bagi sejumlah pengambil kebijakan dalam pembangunannya. Dengan keyakinan tersebut maka strategi pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana men-

capai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsekuensi negatif yang dapat muncul sebagai akibat jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu adalah pusat pembangunan ekonomi nasional dan daerah dimulai pada wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai terutama Jawa. Selain itu pembangunan akan difokuskan pada sektor-sektor yang secara potensial memiliki kemampuan besar dalam menghasilkan nilai tambah yang tinggi terutama sektor industri dan jasa.

Sejak krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 telah berlalu, dalam kurun waktu enam tahun terakhir perekonomian di Kabupaten Banyumas terus mengalami pertumbuhan. Namun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut masih belum menggembirakan mengingat bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas masih lebih rendah daripada tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dan nasional sebagaimana nampak pada Tabel 1. Perkembangan tersebut belum mampu memberikan perubahan yang cukup mencolok terhadap perbaikan kondisi riil ekonomi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor riil di Kabupaten Banyumas belum tumbuh secara maksimal. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada

belum mampu menyerap tenaga kerja secara memadai untuk mengurangi tingkat pengangguran, kemiskinan serta memperbaiki ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas yang relatif rendah dengan laju pertumbuhan yang rendah pula membawa kepada persoalan yang krusial. Konsekuensi dari laju pertumbuhan ekonomi yang rendah, maka meskipun perekonomian di Kabupaten Banyumas mengalami pertumbuhan, namun pendapatan per kapita masyarakatnya masih tergolong rendah. Bahkan terdapat kecenderungan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan per kapita. Hal ini menggambarkan adanya pertumbuhan penduduk ataupun pertumbuhan penduduk miskin yang cukup cepat di Kabupaten Banyumas. Sementara itu dampak kebijakan penyesuaian harga, misalnya harga BBM pada tahun 2005 dan kebijakan penyesuaian pendapatan seperti UMR dan gaji PNS yang memicu inflasi dalam beberapa tahun terakhir ini tentunya juga berpengaruh pada tingkat kemiskinan dan distribusi pendapatan di Kabupaten Banyumas. Laju pertumbuhan ekonomi yang rendah dan kemiskinan yang makin meningkat merupakan masalah yang saling berkaitan di antara keduanya.

Tabel 1: Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah dan Indonesia, 2002 – 2006 (dalam persen)

Tahun	Banyumas	Jawa Tengah	Indonesia
2002	4,51	3,55	4,25
2003	3,71	4,98	5,00
2004	4,17	5,13	4,89
2005	3,21	5,35	5,66
2006	4,48	5,33	5,48

Sumber: BPS Kabupaten Banyumas, BPS Jawa Tengah, dan BPS Pusat Jakarta.

Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas didukung oleh sektor-sektor usaha yang berkembang di daerah. Tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas tidak terlepas dari perkembangan kinerja dan struktur perekonomian Banyumas. Memang bahwa sektor-sektor ekonomi yang mempunyai peranan cukup besar dalam perekonomian Banyumas dari tahun ke tahun tetap dimiliki oleh sektor pertanian, industri, jasa dan perdagangan. Namun meski memiliki proporsi yang cukup besar dalam perekonomian, sektor pertanian dan industri cenderung mengalami penurunan peran dari tahun ke tahun. Kecenderungan ini akan berakibat pada semakin seriusnya persoalan rendahnya kesempatan kerja dan pengangguran terbuka.

Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, konstruksi, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

Kinerja perekonomian Kabupaten Banyumas yang masih relatif rendah dalam lingkup regional maupun nasional pada kenyataannya belum secara memadai mampu mengurangi angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan menjadi masalah yang sangat besar jika tidak segera ditindaklanjuti. Banyak literatur menyatakan bahwa penurunan kemiskinan yang berkelanjutan membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Masyarakat miskin memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi karena dengan pertumbuhan ekonomi maka permintaan pasar terhadap tenaga kerja akan meningkat melalui sektor-sektor yang padat karya seperti pertanian, industri kecil dan

menengah. Tambunan (2006) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat pada tahun 1990-an berperan besar dalam pengurangan kemiskinan di Indonesia, meskipun bukan satu-satunya cara untuk mengurangi kemiskinan.

Berpijak dari fakta tersebut adalah penting untuk diukur ketimpangan distribusi pendapatan dengan koefisien Gini untuk mengetahui kecenderungan yang sebenarnya mengenai distribusi pendapatan di Banyumas. Hal ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana dampak kebijakan pembangunan daerah di Banyumas yang sudah dilakukan selama ini, ketika dampak dari kenaikan harga BBM dan kenaikan upah dan gaji PNS yang memicu inflasi masih terasa bagi masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu seberapa besar pertumbuhan ekonomi yang terbatas di Banyumas mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatannya. Indikator ini juga akan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah dalam mempertimbangkan ketimpangan distribusi pendapatan sebagai pertimbangan dalam strategi pembangunan dan memprioritaskan kebijakan penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan pendapatan atau kesenjangan ekonomi di Kabupaten Banyumas ke depan.

LANDASAN TEORI

Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Pertumbuhan versus distribusi pendapatan merupakan masalah yang menjadi perhatian di negara-negara sedang berkembang (Arsyad, 2004). Banyak negara sedang berkembang yang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun 1960-an mulai menyadari bahwa pertumbuhan yang tinggi hanya sedikit manfaatnya dalam memecahkan masalah kemiskinan. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi banyak dirasakan orang tidak memberikan pada pemecahan masalah

kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan ketika tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut diiringi dengan meningkatnya tingkat pengangguran dan pengangguran semu di daerah pedesaan maupun perkotaan. Distribusi pendapatan antara kelompok kaya dengan kelompok miskin semakin senjang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata telah gagal untuk menghilangkan atau bahkan mengurangi luasnya kemiskinan absolut di negara-negara sedang berkembang.

Data dekade 1970-an dan 1980-an mengenai pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan di banyak negara sedang berkembang, terutama negara-negara dengan proses pembangunan ekonomi yang pesat atau dengan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seperti Indonesia, menunjukkan seakan-akan ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan dan tingkat kesenjangan ekonomi (Tambunan, 2001). Semakin tinggi pertumbuhan PDB atau semakin besar pendapatan per kapita semakin besar perbedaan antara kaum miskin dengan kaum kaya. Studi Ahuja (1997) mengenai negara-negara di Asia Tenggara menunjukkan bahwa setelah sempat turun dan stabil selama periode 1970-an dan 1980-an, pada saat negara-negara itu mengalami laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun yang tinggi (*Asian miracle*), pada awal dekade 1990-an ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara tersebut mulai membesar kembali.

Pertumbuhan GNP per kapita yang cepat tidak secara otomatis meningkatkan tingkat hidup rakyat banyak. Bahkan pertumbuhan GNP per kapita di beberapa negara sedang berkembang seperti Pakistan, India, Kenya, dan lain-lain telah menimbulkan penurunan absolut dalam tingkat hidup orang miskin di perkotaan dan pedesaan. Apa yang disebut dengan proses penetasan ke bawah (*trickle down effect*)

dari manfaat pertumbuhan ekonomi bagi orang miskin tidak terjadi.

Adelman dan Morris (1973) dalam Arsyad (2004) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu: (a) Pertambahan penduduk yang tinggi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan per kapita; (b) Inflasi di mana pendapatan uang bertambah tetapi tidak diikuti secara proporsional dengan pertambahan produksi barang-barang; (c) Ketidakmerataan pembangunan antar daerah; (d) Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga pengangguran bertambah; (e) Rendahnya mobilitas sosial; (f) Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan harga-harga barang hasil industri untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis; (g) Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat ketidakelastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang; dan (h) Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain.

Kecenderungan peningkatan ketimpangan distribusi pendapatan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi tidak saja terjadi di negara-negara sedang berkembang saja, namun juga terjadi di negara-negara industri maju. Studi dari Jantti (1997) dan Mule (1998) dalam Tambunan (2001) memperlihatkan bahwa perkembangan ketimpangan pendapatan antara kaum kaya dan kaum miskin di Swedia, Inggris, Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya di Eropa Barat menunjukkan suatu kecenderungan yang

meningkat selama dekade 1970-an dan 1980-an. Dari studi Jantti disimpulkan bahwa semakin besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di negara-negara tersebut disebabkan oleh pergeseran-pergeseran demografi, perubahan pasar buruh dan perubahan kebijakan-kebijakan publik. Dalam hal perubahan pasar buruh, membesarnya kesenjangan pendapatan dari kepala keluarga dan semakin besarnya andil pendapatan dari istri di dalam jumlah pendapatan keluarga merupakan dua faktor penyebab penting.

PENELITIAN TERDAHULU

Sejumlah studi empirik berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan dari berbagai tinjauan. Beberapa studi menyampaikan beberapa variabel makro-ekonomi berpengaruh terhadap distribusi pendapatan seperti inflasi dan pengangguran menurut studi Mocan (1999) dan Blejer dan Guererro (1990). Sementara itu studi lain menunjukkan pengaruh kebijakan fiskal terutama tingkat pajak juga berpengaruh terhadap ketidakmerataan distribusi pendapatan menurut Auten dan Carroll (1999) serta Feenberg dan Poterba (1993). Beberapa studi empirik berfokus pada hipotesis kurva U terbalik Kuznets, antara lain Mushinski (2001) dan Thornton (2001) yang menguji hubungan antara ketidakmerataan distribusi pendapatan dan tingkat pembangunan yang didukung oleh hasil penelitian.

Sejumlah studi empirik lain secara spesifik menguji faktor lain seperti faktor ekonomi dan institusional dalam mempengaruhi distribusi pendapatan, antara lain oleh Li et al. (2000) yang menguji pengaruh korupsi terhadap distribusi pendapatan, Tanninen (1999) menguji pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap distribusi pendapatan, serta Bourgnon dan Morrison (1998) menguji pengaruh dualisme terutama

hubungannya dengan pertanian terhadap distribusi pendapatan. Beberapa penelitian lebih lanjut menguji kombinasi faktor-faktor tersebut seperti pengeluaran pemerintah, tingkat pembangunan, dan sebagainya dilakukan oleh Deininger dan Squire (1998), Vanhoudt (2000), dan Barro (2000).

Sementara itu penelitian yang menyangkut pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi di daerah di Indonesia antara lain di Kutai Kartanegara oleh BPS (2005) yang menemukan koefisien Gini sebesar 0,31. Koefisien Gini ini mengindikasikan ketimpangan distribusi yang cukup rendah. Hal ini didukung dengan keberhasilan kebijakan dalam menurunkan kemiskinan di kabupaten tersebut. Penelitian lain khususnya di Kabupaten Banyumas pernah dilakukan oleh Suroso dkk (2005) yang menemukan ketimpangan distribusi pendapatan di Banyumas tahun 2005 dengan koefisien Gini sebesar 0,432. Koefisien Gini tersebut mengindikasikan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup besar. Hasil ini juga menunjukkan kecenderungan yang meningkat dibanding keadaan sebelumnya. Dibandingkan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, maka Kabupaten Banyumas yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita lebih rendah menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif tinggi. Selanjutnya penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui kecenderungan terkini mengenai ketimpangan distribusi pendapatan di Banyumas dengan dihubungkan dengan faktor-faktor penyebabnya.

METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

Metode Survei

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei terlebih dahulu. Populasi yang disurvei adalah rumah tangga di setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas. Penarikan sampel rumah tangga di kecamatan

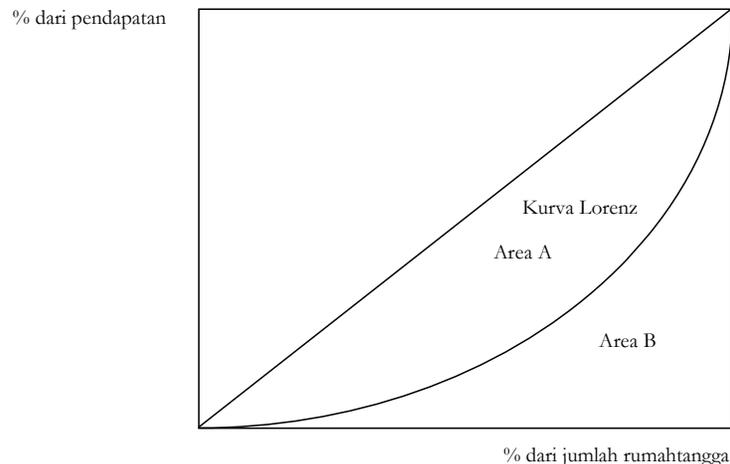
dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kecamatan yang terpilih untuk dijadikan sampel yang dapat mewakili populasi di Kabupaten Banyumas. Kecamatan-kecamatan di Kabupaten Banyumas yang akan dipilih berdasarkan karakteristik wilayah yang ada dengan pertimbangan 3 kelompok wilayah kecamatan tersebut adalah kecamatan kota (*urban*), kecamatan di dekat atau pinggiran kota (*suburban*) dan kecamatan di wilayah pedesaan (*rural*). Setiap kelompok wilayah kecamatan diambil 3 Kecamatan dengan kriteria berturut-turut kecamatan dengan pendapatan per kapita tertinggi, menengah, dan terendah. Selanjutnya rumah tangga yang dijadikan sampel didasarkan strata jenis profesi/jenis pekerjaan yang dimiliki rumah tangga. Tujuan pengelompokan ini adalah mendapatkan variasi dari setiap strata yang lebih kecil daripada variasi keseluruhan populasi sehingga akan menghasilkan dugaan yang memiliki ketepatan lebih tinggi.

Pengambilan sampel dari setiap strata sebanding (proporsional) dengan ukurannya. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner yang telah disusun dengan pertanyaan terbuka maupun tertutup dengan

mengunjungi responden di rumahnya, kantor atau suatu tempat yang mudah ditemui.

Perhitungan Koefisien Gini

Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara kurva Lorenz dengan garis pemerataan sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz seperti yang nampak pada Gambar 1. Jadi koefisien Gini yang rendah mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan semakin merata, sebaliknya semakin besar koefisien Gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Secara ekstrim diartikan bahwa koefisien Gini sebesar 0 berarti terdapat pemerataan sempurna (setiap orang memperoleh pendapatan yang sama persis) dan koefisien Gini sebesar 1 menunjukkan ketidakmerataan sempurna (di mana satu orang memiliki/menguasai seluruh pendapatan totalnya, sementara lainnya tidak memperoleh pendapatan sama sekali).



Gambar 1: Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang menggambarkan fungsi distribusi pendapatan kumulatif. Jika kurva Lorenz tidak diketahui, maka pengukuran ketimpangan distribusi pendapatan dapat dilakukan dengan rumus koefisien Gini yang dikembangkan oleh Gini (1912). Kurva Lorenz diproksi atas setiap kelas interval dari pendapatan, sehingga luas area B pada kurva Lorenz dapat proksi dengan koefisien Gini:

$$G = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$$

X_k adalah proporsi kumulatif dari jumlah rumah tangga, untuk $k = 0, \dots, n$, dengan $X_0 = 0$, $X_n = 1$. Y_k adalah proporsi kumulatif dari jumlah pendapatan rumah tangga sampai kelas ke- k , untuk $k = 0, \dots, n$, dengan $Y_0 = 0$, $Y_n = 1$.

Kurva Lorenz di atas dapat didekati dengan memperoleh fungsi non linear dengan cara melakukan plotting titik-titik pasangan atau kooordinat interval pendapatan dan jumlah rumah tangga kumulatif dengan jumlah kelas tertentu. Semakin banyak kelas yang digunakan maka akan semakin halus kurva Lorenz yang diperoleh. Pada gambar Kurva Lorenz, koefisien Gini sebesar luas area A dibagi luas area (A+B). Karena $(A+B) = 0,5$, maka:

$$G = A/0,5 = 2A = 1 - 2B$$

Jika kurva Lorenz dinyatakan dengan fungsi $Y = L(X)$, maka nilai B dapat diperoleh dengan mencari nilai integral dari fungsi tersebut yaitu $\int_0^1 L(X)dX$, sehingga koefisien Gini menjadi:

$$G = 1 - 2\int_0^1 L(X)dX$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Koefisien Gini Kabupaten Banyumas

Dengan pertimbangan data pendapatan per kapita kecamatan di Kabupaten Banyumas tahun 2006 yang berada pada ketiga kategori wilayah yang dipilih sesuai dengan metodologi penelitian maka terpilih (1) Purwokerto Timur, Purwokerto Barat, dan Purwokerto Utara mewakili wilayah kota (*urban*); (2) Sokaraja, Kembaran, dan Sumbang mewakili wilayah pinggiran kota (*suburban*); dan (3) Ajibarang, Cilongok dan Pekuncen mewakili wilayah desa (*rural*) masing-masing sebagai kecamatan dengan pendapatan per kapita tertinggi menengah dan terendah. Selanjutnya untuk setiap kecamatan diambil 20 rumah tangga yang tersebar dalam berbagai profesi dan mata pencaharian secara proporsional dengan struktur mata pencaharian di setiap kecamatan, sehingga sampel total yang diambil adalah 180 rumah tangga.

Dengan memperhatikan perkembangan kondisi lima tahun terakhir dan berbagai faktor yang mendukung, maka ketimpangan distribusi pendapatan di Banyumas diproyeksikan meningkat atau lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Dari hasil perhitungan terhadap sampel rumah tangga tersebut diperoleh bahwa koefisien Gini di Kabupaten Banyumas pada tahun 2008 adalah sebesar 0,63 seperti tampak pada Tabel 2.

Tabel 2: Perhitungan Koefisien Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2008

Koefisien Gini Kabupaten Banyumas 2008								
A	B	C	D	E	F	G	H	I
0.1	55,380,000	0.1	55,380,000	0.1	0.010	0.1	0.010	0.001026776
0.1	75,000,000	0.2	130,380,000	0.2	0.024	0.1	0.034	0.003444095
0.1	105,000,000	0.3	235,380,000	0.3	0.044	0.1	0.068	0.006781396
0.1	129,600,000	0.4	364,980,000	0.4	0.068	0.1	0.111	0.011131011
0.1	168,600,000	0.5	533,580,000	0.5	0.099	0.1	0.167	0.016659807
0.1	258,000,000	0.6	791,580,000	0.6	0.147	0.1	0.246	0.02456921
0.1	361,200,000	0.7	1,152,780,000	0.7	0.214	0.1	0.360	0.036049526
0.1	476,400,000	0.8	1,629,180,000	0.8	0.302	0.1	0.516	0.0515791
0.1	744,000,000	0.9	2,373,180,000	0.9	0.440	0.1	0.742	0.074206
0.1	3,020,400,000	1	5,393,580,000	1	1.000	0.1	1.440	0.144000089
1	5,393,580,000					1	3.694	0.369447009
						G = 1 - 0.369447009		
						Koefisien Gini	0.630552991	

Kolom A : Kelas rumah tangga
 Kolom B : Kelas pendapatan
 Kolom C : Kumulatif rumah tangga
 Kolom D : Kumulatif pendapatan
 Kolom E : Proporsi kumulatif rumah tangga (X)
 Kolom F : Proporsi kumulatif pendapatan (Y)
 Kolom G : $X_k - X_{k-1}$
 Kolom H : $Y_k + Y_{k-1}$
 Kolom I : $(X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$, k : kelas ke-k

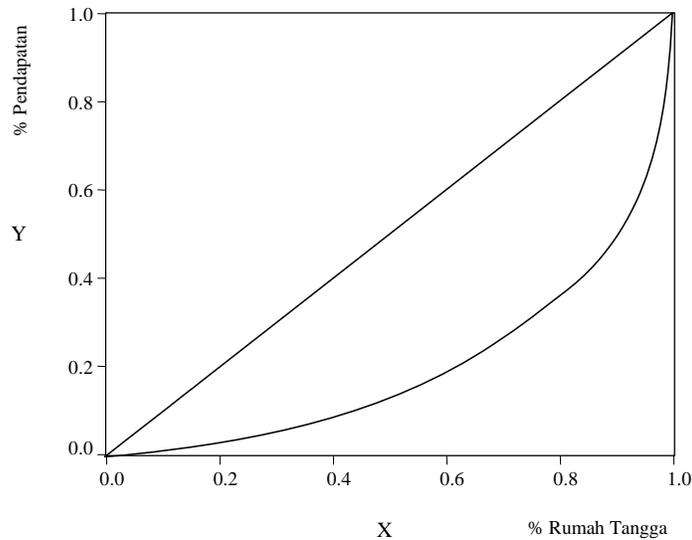
Selanjutnya jika kurva Lorenz dinyatakan dengan fungsi $Y = L(X)$, estimasi atau taksiran persamaan tersebut diperoleh fungsi $Y = 0,867X^{3,69}$ dan integralnya :

$$\int_0^1 L(x)dx = 0,184861407X^{4,69} = 0,184861407$$

 dan koefisien Gini sebesar :

$$G = 1 - 2 \int_0^1 L(x)dx = 1 - 0,3697 = 0,6303$$

Apabila fungsi distribusi divisualisasikan dengan kurva Lorenz maka distribusi pendapatan rumah tangga di Banyumas tahun 2008 dalam penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut ini.

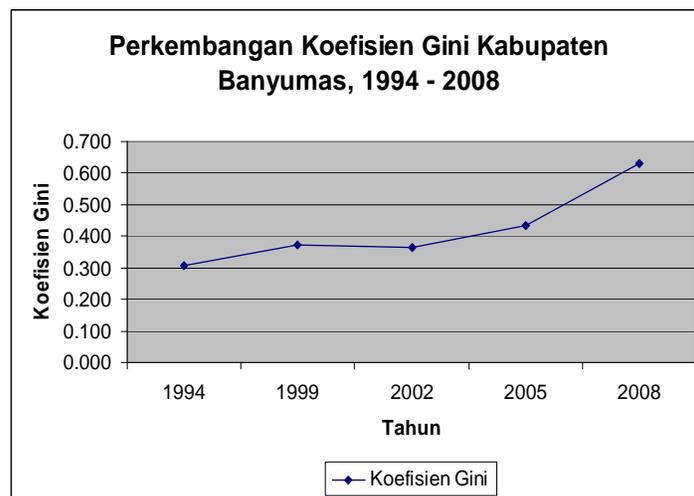


Sumber: Data primer diolah

Gambar 2: Kurva Lorenz Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas Tahun 2008.

Pada Gambar 2 nampak bahwa kurva Lorenz yang menggambarkan distribusi pendapatan di Kabupaten Banyumas terletak jauh dari garis diagonal atau garis pemerataan. Letak kurva ini meng-

indikasikan adanya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang tinggi. Hal ini sejalan dengan angka koefisien Gini yang cukup besar yaitu 0,63.



Sumber: Data primer diolah

Gambar 3: Perkembangan Koefisien Gini di Kabupaten Banyumas 1994 - 2008.

Pada Gambar 3 di atas jika koefisien Gini tahun 2008 dibandingkan dengan koefisien Gini pada tahun-tahun sebelumnya nampak ada kecenderungan meningkat cukup besar. Hal ini mengindikasikan terjadinya peningkatan ketimpangan distribusi antar rumah tangga di Kabupaten Banyumas.

Distribusi Perolehan Pendapatan Antar Kelompok Rumah Tangga

Dari hasil penelitian terhadap sampel rumah tangga diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa kelompok 40% masyarakat berpendapatan terendah (miskin) hanya memperoleh 6,8% dari total pendapatan. Sementara itu kelompok 40% masyarakat berpendapatan menengah memperoleh 23,4% dari total pendapatan. Kelompok 20% masyarakat berpendapatan tertinggi (kaya) memperoleh 69,8% dari total pendapatan.

Tabel 3: Distribusi Perolehan Pendapatan Antar Kelompok Rumah Tangga di Kabupaten Banyumas Tahun 2008.

No	Kelompok Masyarakat	Perolehan Pendapatan (%)
1.	40% berpendapatan terendah	6,8
2.	40% berpendapatan menengah	23,4
3.	20% berpendapatan tertinggi	69,8

Sumber : Data primer diolah

Ketidakmerataan yang diukur dengan koefisien Gini dinyatakan tinggi jika berkisar antara 0,5 – 0,7; sedang jika berkisar 0,36 – 0,49 dan rendah jika berkisar antara 0,2 – 0,35. Dilihat dari Koefisien Gini sebesar 0,630 maka ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga di Banyumas sudah demikian serius atau tergolong parah.

Menurut kriteria Bank Dunia, tingkat ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan dinyatakan tinggi jika 40% penduduk dari

kelompok berpendapatan rendah menerima lebih kecil dari 12% dari jumlah pendapatan, tingkat ketidakmerataan sedang jika kelompok tersebut menerima antara 12% sampai 17% dari jumlah pendapatan, dan tingkat ketidakmerataan rendah jika kelompok tersebut menerima lebih besar dari 17% dari jumlah pendapatan. Dengan melihat distribusi perolehan pendapatan antar kelompok rumah tangga seperti pada Tabel 3 maka ketimpangan distribusi pendapatan di Banyumas tahun 2008 menurut kriteria Bank Dunia tersebut dinyatakan tinggi atau parah karena 40% penduduk berpendapatan rendah hanya memperoleh 6,8% dari jumlah pendapatan.

Faktor-Faktor Penyebab Peningkatan Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Kabupaten Banyumas

Meningkatnya angka kemiskinan akibat rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan rendahnya pendapatan per kapita. Turunnya kontribusi sektor pertanian dan industri padat karya dengan indikasi turunnya kontribusi sektor pertanian, rendahnya pendapatan petani, turunnya daya beli bagi petani, usaha kecil dan rumah tangga. Kurang memadainya sektor informal dalam memberikan hasil dan pendapatan bagi pelaku ekonomi sektor informal akibat biaya modal dan produksi serta rendahnya permintaan akibat turunnya pendapatan riil masyarakat karena inflasi. Adanya polarisasi perolehan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan terendah seperti petani, buruh dan pegawai kecil serta pelaku sektor informal dengan kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi seperti pengusaha, wiraswatawan, dan profesional, sehingga kondisi ini meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 dan inflasi yang terjadi berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan

pengeluaran investasi sehingga membuat iklim usaha yang kurang menguntungkan terutama bagi usaha kecil dan rumah tangga, petani dan sektor informal. Turunnya pendapatan relatif bagi kelompok masyarakat berpendapatan terendah (40% terendah) dan tingginya pendapatan relatif bagi masyarakat berpendapatan tertinggi (20% tertinggi) membuat ketimpangan distribusi pendapatan meningkat dengan indikasi meningkatnya Koefisien Gini. Dari distribusi pendapatan masyarakat di Kabupaten Banyumas, nampak bahwa perolehan 20% masyarakat berpendapatan tertinggi sangat menonjol (memperoleh 69,8% pendapatan), sedangkan perolehan 40% masyarakat berpendapatan terendah sangat kecil (hanya 6,8% pendapatan).

Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Tiap Kecamatan

Kecamatan di wilayah kota terutama Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat yang memiliki kontribusi PDRB Banyumas

rata-rata per tahun 2002 – 2006 masing-masing sebesar 13,034 persen dan 6,096 persen yang kecenderungannya meningkat dari tahun ke tahun jelas sangat mencolok dan cenderung dominan. Sementara kecamatan-kecamatan lain seperti Pekuncen dengan kontribusi PDRB rata-rata 2,538 persen cenderung menurun kontribusinya dari tahun ke tahun. Jumlah PDRB Kecamatan Purwokerto Timur banyak disumbang oleh sektor Jasa-jasa (28,57%), angkutan dan komunikasi (23,43%), bangunan (15,94%) sedangkan sektor pertanian hanya (2,14 %) pada tahun 2006.

Jumlah PDRB Purwokerto Barat banyak disumbang oleh sektor bangunan (22,42%), sektor angkutan dan komunikasi (18,34%), jasa-jasa (14,75%) dan pertanian hanya memberikan sumbangan 4,02% pada tahun 2006. Sebaliknya PDRB Kecamatan Pekuncen masih didominasi oleh sektor pertanian sebagai sektor yang memberikan kontribusi terbesar bagi PDRB Kecamatan Pekuncen sebesar 41,41 % pada tahun 2006.

Tabel 4: Distribusi Pendapatan Antar Kelompok Rumah Tangga dan Koefisien Gini Tiap Kecamatan Sampel di Kabupaten Banyumas Tahun 2008.

No	Kecamatan	Perolehan Pendapatan 40% Terendah	Perolehan Pendapatan 40% Menengah	Perolehan Pendapatan 20% Tertinggi	Koefisien Gini
1.	Purwokerto Utara	12,2%	36,8%	51%	0,442
2.	Purwokerto Barat	3,1%	14,5%	82,4%	0,751
3.	Purwokerto Timur	2,6%	9,2%	88,2%	0,795
4.	Kembaran	15,8%	41,9%	42,3%	0,366
5.	Sokaraja	10,2%	40,2%	49,6%	0,482
6.	Sumbang	9,6%	28,5%	61,9%	0,552
7.	Cilongok	12,8%	41,5%	45,7%	0,423
8.	Ajibarang	7,3%	27,7%	65%	0,596
9.	Pekuncen	12,3%	40,8%	46,9%	0,426
	Keseluruhan	6,8%	23,4%	69,8%	0,630

Sumber : Data primer diolah

Dari gambaran Tabel 4 dapat ditarik kesimpulan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan yang lebih tinggi di Banyumas terjadi pada wilayah-wilayah yang sektor-sektor non pertanian atau bisa dikatakan sektor modern seperti jasa, bangunan, angkutan dan komunikasi keuangan dan perdagangan memberikan kontribusi dan meningkat lebih besar dibanding pertanian. Sementara wilayah yang masih memiliki sektor pertanian sebagai sektor utama dan memberikan kontribusi terbesar memiliki ketidakmerataan distribusi pendapatan yang relatif kecil. Hal ini sesuai dengan teori pertumbuhan model Lewis yang menyatakan bahwa ketimpangan dalam sektor modern yang tengah mengalami pertumbuhan pesat itu sendiri jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan dan konstan.

Jika koefisien Gini dibandingkan antara wilayah desa dengan kota seperti terlihat pada Tabel 5 di bawah nampak bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di wilayah desa dengan koefisien Gini sebesar 0,503 relatif rendah dibandingkan wilayah kota yang koefisien Gininya sebesar 0,720. Kecenderungan ini menyimpulkan dari perbedaan ketimpangan distribusi pendapatan antar kecamatan. Wilayah desa yang umumnya masih didominasi sektor pertanian sebagai penyumbang PDRBnya memiliki ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif rendah dibandingkan wilayah kota yang didominasi oleh sektor non pertanian seperti jasa, angkutan, bangunan dan keuangan.

Pada Tabel 5 pula nampak bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan di wilayah kota lebih tinggi daripada wilayah pedesaan. Persentase perolehan pendapatan tertinggi terutama dimiliki oleh 20% kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi yang berada di wilayah kota jauh lebih besar daripada yang diperoleh kelompok yang sama di pedesaan. Ketimpangan distribusi pendapatan yang tinggi di kota akibat berpolarnya perolehan pendapatan antara 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah seperti pelaku sektor informal, buruh dan pegawai rendah dengan 20% kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi seperti para pengusaha, wiraswastawan, dan profesional yang lebih mampu memperoleh penghasilan tinggi di kota dan di sektor yang memberikan nilai tambah atau output tinggi.

Mata pencaharian penduduk di wilayah desa kebanyakan didominasi oleh petani, buruh tani, buruh industri dan buruh bangunan serta pedagang yang memiliki variasi pendapatan yang relatif kecil dibandingkan wilayah kota. Sementara itu variasi pendapatan dari mata pencaharian penduduk wilayah kota terutama antara buruh tani, buruh industri, buruh bangunan, serta pelaku sektor informal dengan pengusaha, pedagang dan profesional sangat tinggi sehingga menimbulkan ketidakmerataan distribusi pendapatan yang relatif tinggi di kota terutama di Kecamatan Purwokerto Timur dan Purwokerto Barat.

Tabel 5: Distribusi Pendapatan Antar Kelompok Rumah Tangga dan Koefisien Gini Desa, Kota, Desa + Kota di Kabupaten Banyumas Tahun 2008.

No	Wilayah	Perolehan Pendapatan 40% Terendah	Perolehan Pendapatan 40% Menengah	Perolehan Pendapatan 20% Tertinggi	Koefisien Gini
1.	Desa	10,5%	33,5%	56%	0,503
2.	Kota	4,0%	16,6%	79,4%	0,720
	Desa + Kota	6,8%	23,4%	69,8%	0,630

Sumber: Data primer diolah

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga di Kabupaten Banyumas sampai dengan saat ini. Kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga tersebut terjadi karena semakin menurunnya pendapatan relatif dan pendapatan riil oleh 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah akibat; (1) dari sisi penawaran antara lain terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah; (2) dari sisi permintaan antara lain karena kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi usaha mereka dan permintaan yang rendah akibat inflasi dan kenaikan harga BBM sejak 2005 sehingga terjadi penurunan daya beli konsumen sehingga tidak meningkatkan pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil.

Di pihak lain kelompok 20% masyarakat berpendapatan tinggi yang umumnya pengusaha besar, profesional dan wiraswasta mampu memperoleh penghasilan yang tinggi. Pengusaha besar memiliki kesempatan memperoleh penghasilan yang tinggi di tengah minimnya upah buruh atau pekerja. Selain itu kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi yang di dalamnya terdapat pengusaha, wiraswastawan, dan profesional serta profesi lainnya yang diuntungkan dengan adanya peningkatan sektor modern seperti sektor jasa, keuangan, bangunan, angkutan dan komunikasi terutama di kota sebagai pusat kegiatan ekonomi. Kelompok masyarakat berpendapatan tinggi relatif tidak terpengaruh secara berarti dengan adanya inflasi dan kenaikan harga BBM serta kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dibanding

kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Kesempatan kerja di sektor-sektor seperti industri besar, bangunan, perdagangan dan keuangan memang memberikan pendapatan dan nilai tambah yang tinggi namun ketersediaannya terbatas dan lebih banyak di perkotaan daripada di pedesaan yang didominasi oleh sektor primer, sehingga menimbulkan ketimpangan pendapatan terutama antara perkotaan dengan pedesaan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori pertumbuhan model Lewis yang menyatakan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan dalam sektor modern (perkotaan) seperti Kecamatan Purwokerto Timur dan Kecamatan Purwokerto Barat sebagai pusatnya kegiatan ekonomi yang tengah mengalami pertumbuhan pesat itu sendiri jauh lebih besar daripada yang terkandung dalam sektor tradisional yang relatif stagnan dan konstan.

Rekomendasi Kebijakan

Beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dengan lebih memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan. Kecenderungan meningkatnya ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga membuat pemerintah daerah harus lebih serius untuk menangani masalah ketimpangan distribusi pendapatan dan kemiskinan dengan kebijakan lebih bervisi pada: (1) kebijakan pembangunan yang pro kemiskinan (*pro-poor*) tanpa mengabaikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan ekonomi pedesaan; (2) promosi dan pengembangan sektor informal; (3) pengembangan usaha kecil menengah (UKM) melalui sentra-sentra industri komoditi lokal, (4) pengembangan agribisnis dan agroindustri untuk menciptakan

keterkaitan sektoral untuk mengangkat sektor pertanian. Pembangunan pertanian dan ekonomi pedesaan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumberdaya usaha pertanian melalui revitalisasi penyuluhan dan pendampingan petani, serta penumbuhan dan penguatan lembaga pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan posisi tawar petani.

Mengingat relatif sulitnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi yang diharapkan dari investasi usaha-usaha besar maka pemerintah daerah disarankan untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat yang merupakan potensi yang tersembunyi (*hidden potential*) termasuk di dalamnya UKM dan sektor informal untuk mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan.

Pemberdayaan ekonomi rakyat ini telah terbukti dan telah dilaksanakan di Bangladesh yang dipelopori oleh Dr. M. Yunus dengan Bank Grameen-nya yang telah mampu mengangkat jutaan rakyat miskin di negaranya. Demikian halnya dengan De Soto yang telah mengangkat orang miskin di Peru dengan memberdayakan sektor informal.

Pemerintah daerah juga perlu melakukan kebijakan peningkatan upah buruh dan pekerja dengan disesuaikan kembali dengan kebutuhan hidup layak minimum terkini akibat inflasi melalui kebijakan kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) untuk mengurangi kesenjangan pendapatan yang besar antara buruh dengan pengusaha yang terjadi terutama di sektor modern dan perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. (2004). *Ekonomi Pembangunan*, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2007). *Beberapa Indikator Utama Sosial Ekonomi Indonesia*.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas, *Kabupaten Banyumas Dalam Angka*, berbagai terbitan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Kartanegara. (2006). *Indikator Sosial Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara*.
- BAPPEDA – Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. (2006). *Pendapatan Regional Kabupaten Banyumas*.
- Barro, R. J. (2000). 'Inequality and Growth in a Panel of Countries', *Journal of Economic Growth*, Vol. 5, No. 1.
- Benabou, R. (1996), 'Inequality and Growth', *NBER Macroeconomics Annual*.
- Benhabib, J. and A. Rustichini. (1996). 'Social Conflict and Growth', *Journal of Economic Growth*, Vol. 1, No. 1.
- Bertola, G. (1993). 'Market Structure and Income Distribution in Endogenous Growth Models', *American Economic Review*, Vol. 83.
- Blejer, M. I. and I. Guerrero. (1990). 'The Impact of Macroeconomic Policies on Income Distribution: An Empirical Study of Philippines', *Review of Economics and Statistics*, Vol. 72.

- Bourgignon, F. and C. Morrisson (1998), 'Inequality and Development: The Role of Dualism', *Journal of Development Economics*, Vol. 57.
- Deininger, K. and L. Squire (1998), 'New Ways of Looking at Old Issues: Inequality and Growth', *Journal of Development Economics*, Vol. 57.
- Feenberg, D. and J. Poterba (1993), 'Income Inequality and the Incomes of Very High Income Tax Payers: Evidence from Tax Returns', *Tax Policy and the Economy*, Vol. 7.
- Galor, O. and J. Zeira (1993), 'Income Distribution and Macroeconomics' *Review of Economic Studies*, Vol. 60.
- Gini, Corrado (1921), "Measurement of Inequality and Incomes". *The Economic Journal* 31. (<http://en.wikipedia.org>)
- Kuncoro, Mudrajad (2003), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Li, H., L. C. Xu and H. Zou (2000), 'Corruption, Income Distribution, and Growth', *Economics and Politics*, Vol. 12, No. 2, pp. 155–82.
- Meier, Gerald M. and James E. Rauch (2000), *Leading Issues in Economic Development*, Seventh Edition, Oxford University Press, New York.
- Mocan, H. N. (1999), 'Structural Unemployment, Cyclical Unemployment, and Income Inequality', *Review of Economics and Statistics*, Vol. 81, No. 1.
- Mohtadi, H. (1988), 'Growth-distribution Trade-offs: The Role of Capacity Utilization', *Cambridge Journal of Economics*.
- Perotti, R. (1996), 'Growth, Income Distribution, and Democracy: What the Data Say', *Journal of Economic Growth*, Vol. 1, No. 2.
- Suroso, Agus dkk. (2005), *Perhitungan Indeks Rasio Gini Kabupaten Banyumas Tahun 2005*, Fakultas Ekonomi, Universitas Jenderal Soedirman.
- Tambunan, Tulus T.H. (2001), *Perekonomian Indonesia : Teori dan Temuan Empiris*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Todaro, Michael P. (2000), *Economic Development*, Pearson Education Limited, New York.

Indeks Subjek

- Agribisnis 20
- Agroindustri 20
- Daya beli konsumen 19
- Dualisme 7
- Efek menetes ke bawah 2
- Ekonomi pedesaan 20
- Ekonomi rakyat 20, 21
- Garis kemiskinan 2
- Hipotesis kurva U terbalik Kuznets 7

Industri padat karya 15
Inflasi 3, 4, 6, 7, 15, 16, 19, 21
Kebijakan fiskal 7
Kelompok masyarakat berpendapatan terendah 15, 16, 18, 19
Kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi 18, 19
Kesempatan kerja 4, 19
Kesenjangan ekonomi 2, 5
Ketimpangan distribusi pendapatan 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20
Keterkaitan sektoral 20
Koefisien Gini 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Komoditi local 20
Kurva Lorenz 9, 10, 11, 12, 13
Nilai tambah 2, 4
Proyek padat modal 6
Pembangunan pertanian 20
Pembangunan yang pro kemiskinan 20
Pendampingan petani 20
Pendapatan per kapita 11, 15
Pengangguran terbuka 4
Pengeluaran pemerintah 7, 8
Pertumbuhan ekonomi 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 20
Revitalisasi penyuluhan 20
Sektor informal 15, 16, 18, 19, 20, 21
Sektor jasa 16, 19
Sektor modern 17, 19, 20, 21
Sektor pertanian 3, 4, 15, 16, 17, 18, 20
Sektor tradisional 17, 20
Sektor industri 2
Sentra industri 20
Teori pertumbuhan model Lewis 17, 20
Tingkat pengangguran 2, 5
Upah minimum kabupaten 21
Usaha kecil dan rumah tangga 15, 16, 19
Wilayah kota 11, 16, 18
Wilayah pinggiran kota 11
Wilayah desa 11, 18

Indeks Pengarang

Agus Suroso 8, 22
A. Rustichini 21
C. Morrisson 6, 21
Corrado Gini 10, 21
D. Feenberg 7, 22
F. Bourignon 7, 21
G. Bertola 21
Gerald M. Meier 22

H. Li 7, 21
H. Mohtadi 22
H. N. Mocan 7, 22
H. Zou 22
I. Guerrero 21
James E. Rauch 22
J. Benhabib 21
J. Poterba 7, 22
J. Zeira 22
K. Deininger 8, 22
Lincoln Arsyad 5, 6
L. C. Xu 22
L. Squire 8, 22
M. I. Blejer 7, 21
Michael P. Todaro 22
Mudrajad Kuncoro 22
O. Galor 22
R. Benabou 21
R. J. Barro 8, 21
R. Perotti 22
Tulus Tambunan 1, 4, 5, 7, 22